

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang yang mempunyai potensi pariwisata cukup besar, diakui bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap perolehan devisa terus meningkat setiap tahunnya. Penerimaan devisa pariwisata pada tahun 2016 diperkirakan mencapai US\$10,1 miliar atau naik 10,99% dibanding penerimaan devisa tahun 2015 yang sebesar US\$9,1 miliar.¹ Hal ini membuktikan bahwa pariwisata sangat relevan untuk dikelola dengan baik sebagai alat pendapatan devisa negara. Selain peningkatan ekonomi pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja secara makro yang cukup signifikan. Hasil dari kajian para ahli berkesimpulan bahwa sumbangan pariwisata yang secara signifikan pada perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tampak dalam bentuk perluasan peluang kerja, peningkatan pendapatan (devisa) dan pemerataan pembangunan.²

Pariwisata sebenarnya bukanlah fenomena baru di dunia. Pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat.³ Pengelolaan pariwisata yang ideal dilakukan bersama-sama antara

¹Data BPS terkait Pengembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional No. 12/02/Th. XVII, 3 Februari 2016. Diakses di http://bps.go.id/website/brs_ind/pariwisata_03feb14.pdf. Pada tanggal 25 Juli 2022.

²Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h 4.

³Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 41.

masyarakat dan pemerintah sehingga terjadi kerjasama yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek, akan tetapi lebih ke partner. Dengan menjalankan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tidak merusak kearifan lokal. Hal iniseperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Kepariwisata bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴

Pembangunan wilayah pesisir dan laut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Demikian pula dalam pembangunan wilayah pesisir untuk kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan mengedepankan upaya deversifikasi usaha dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pesisir disamping usaha perikanan. Pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru mempunyai dimensi-dimensi dan persepsi-persepsi yang bervariasi mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di daerah tujuan wisatawan.⁵

Kabupaten Buru khususnya wilayah pesisir wilayah pantai desa Jikumerasa mempunyai garis pantai sepanjang \pm 3 km dengan kondisi geografis

⁴Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisataan*. Bab III mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pasal 5.

⁵Wahab, Salah, *Manajemen Kepariwisataan*, Alih Bahasa Fans Gromang. Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), h. 5.

wilayah pesisir dengan pantai pasir putih berbatu memiliki nilai ekonomi dan banyak berkembang menjadi kawasan wisata pantai. Wilayah pesisir yang dimiliki ini dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk kegiatan pariwisata pantai dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (sektor ekonomi) guna sebagai salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah juga meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat dan sekitarnya. Kebijakan ini dilakukan karena sektor pariwisata pantai dapat mendatangkan devisa dari pengeluaran wisatawan baik lokal, regional maupun mancanegara. Beberapa wilayah pesisir yang selama ini dikembangkan menjadi kawasan wisata pantai adalah salah satunya yakni Pantai Baikolet yang terdapat di Kabupaten Buru.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan sebelumnya, banyak hal yang peneliti temukan terkait dengan keberadaan pantai Baikolet yang sering didengar dan disebutkan oleh masyarakat yang berkunjung ke pantai tersebut. Berkenaan dengan observasi tersebut ditemukan bahwa dengan adanya pantai Baikolet sebagai tempat wisata pantai ternyata memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat Baikolet dan sekitarnya yang berkaitan dengan perekonomian khususnya para pedagang dan penyedia jasa lainnya. Hal ini cukup beralasan karena hampir setiap harinya masyarakat menjajakan barang dagangannya berupa kue, gorengan, makanan ringan, rujak dan jenis makanan lainnya serta penyedia jasa seperti tenda, tarpal alas duduk, gazebo, perahu, banana boat, bantal renang dan lain sebagainya yang diyakini oleh peneliti memberikan dampak kepada masyarakat sekitar dalam perekonomian mereka.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keberadaan pantai wisata di desa Jikumerasa merupakan suatu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat terutama umat Islam di desa Jikumerasa. Pembangunan pariwisata yang telah dilaksanakan diberbagai sektor kegiatan di pantai wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari berbagai sektor usaha. Karena secara teoritis pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga tujuan dapat dicapai menuju masyarakat yang makmur.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Keberadaan Pantai Wisata Baikolet Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Jikumerasa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada aspek diantaranya; 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya pantai wisata di Desa Jikumerasa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru dan 2. Tinjauan keuangan syariah terhadap keberadaan pantai wisata Baikolet dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jikumerasa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana keberadaan pantai wisata Baikolet dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru?.
2. Bagaimana tinjauan keuangan syariah terhadap keberadaan pantai wisata Baikolet dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keberadaan pantai wisata Baikolet dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.
2. Untuk menjelaskan tinjauan keuangan syariah terhadap keberadaan pantai wisata Baikolet dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi akademis diharapkan dapat mengetahui sistem pengelolaan pantai Baikolet desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru sehingga akan bermanfaat untuk mendorong perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkaitan dengan dampak positif dan negatifnya sehingga bisa diketahui solusi terbaik untuk mengatasi dampak negatifnya bila ada.
2. Memberikan informasi yang berkaitan dengan dampak pengelolaan pantai Baikolet desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam terkhususnya bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Buru

diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penetapan kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Baikolet dimasa mendatang yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, karena dapat memperoleh pengetahuan serta gambaran mengenai beberapa dampak yang disebabkan oleh pengembangan pariwisata bagi masyarakat sekitar.

F. Defenisi Operasional

Untuk membatasi permasalahan dan pengertian dalam penelitian ini perlu dirumuskan lingkup materi (*substansial*) penelitian sebagai berikut:

1. Wisata pantai merupakan kegiatan wisata bagi masyarakat atau pengunjung yang mengutamakan sumberdaya pantai dan budaya masyarakat pantai seperti rekreasi, olahraga dan menikmati pemandangan baik pasair pantai maupun sumberdaya bawah laut dan dinamika air laut.
2. Pantai Baikolet merupakan salah satu pantai yang dijadikan sebagai objek wisata pantai dalam kegiatan rekreasi menikmati keindahan lingkungan alam dan atraksi wisata yang langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan yang terletak di desa Jikumerasa Kabupaten Buru yang dikelola baik oleh pemerintah desa Jikumerasa melalui dinas Pariwisata Kabupaten Buru.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perubahan terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan serta produktivitas masyarakat akibat aktivitas/kegiatan pariwisata berupa kegiatan berdagang atau penyedia jasa kepada para pengunjung dengan tujuan memperoleh pendapatan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

4. Keungan syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis yang menganut asas Islam dalam berbagai bentuknya yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁶

⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 38